

KAJIAN DEFINISI, MANFAAT, DAN TUJUAN KEBIJAKAN KESEHATAN DALAM KONTEKS PENANGGULANGAN STUNTING: STUDI KASUS KOTA PALEMBANG

Lutfi Febrianti¹, Tia Rewinta Nababan², Shiva Kirana Azzahra³, Ayu Nur Alfath⁴, Farras Athiya⁵, Amnah Aulia Ramadhani⁶, Fadia⁷, Reva Ramdayanti⁸, Riza Adelia Suryani⁹, Galuh Efnol Adzan¹⁰, Novitry Pratiwi¹¹

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya ¹⁻¹¹

Email: 07011182429023@student.unsri.ac.id

Informasi

Abstract

Volume : 3
Nomor : 10
Bulan : Oktober
Tahun : 2026
E-ISSN : 3062-9624

Stunting remains a health problem that needs attention because it can affect children's growth and the quality of human resources. This study aims to determine the definition, benefits, and objectives of health policies in addressing stunting in Palembang City. This study uses a qualitative method with a literature review approach. Data were obtained from government regulations, books, scientific articles, and previous studies. The results show that health policies play an important role in directing efforts to address stunting. These efforts are carried out through nutritional fulfillment, supplementary feeding, family assistance, and cooperation across sectors. In Palembang City, various policies and programs have been implemented to reduce stunting. However, there are still challenges in coordination and program supervision. Therefore, good cooperation is needed so that stunting prevention and reduction efforts can be carried out optimally.

Keyword: Health Policy, Stunting, Palembang City, Stunting Prevention

Abstrak

Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi pertumbuhan anak dan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui definisi, manfaat, dan tujuan kebijakan kesehatan dalam penanggulangan stunting di Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari peraturan pemerintah, buku, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan berperan penting dalam mengarahkan upaya penanggulangan stunting. Pelaksanaannya dilakukan melalui pemenuhan gizi dan pemberian makanan tambahan serta pendampingan keluarga dan kerja sama antar sektor. Di Kota Palembang sudah terdapat berbagai kebijakan dan program untuk menurunkan stunting. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan di Kota Palembang, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik agar penanggulangan stunting dapat berjalan secara optimal.

Kata Kunci : Kebijakan Kesehatan, Stunting, Kota Palembang, Penanggulangan Stunting

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena berhubungan dengan kualitas hidup dan perkembangan sumber daya manusia. Salah satu masalah kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian adalah stunting. Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang dapat berdampak pada perkembangan dan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Secara nasional, hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 menunjukkan tren penurunan prevalensi stunting balita menjadi 21,5%, meskipun capaian ini masih bervariasi antarprovinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Oleh karena itu, penanggulangan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan peran pemerintah dan berbagai pihak terkait.

Dalam penanggulangan stunting, pemerintah memiliki peran penting dalam mengarahkan berbagai upaya melalui kebijakan dan program yang terintegrasi. Fatikha & Permatasari (2024) menunjukkan bahwa penanganan stunting melibatkan sinergi antarkementerian dan lembaga, dimana pemerintah Indonesia melakukan sinergi antarkementerian dan lembaga dalam menghadapi permasalahan stunting, yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, BKKBN, TNP2K, BPOM, serta kementerian dan lembaga lainnya. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan stunting tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi membutuhkan koordinasi dan kerja sama antaraktor agar kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara lebih terpadu. Proses kebijakan juga tidak hanya mencakup perumusan, tetapi sampai pada tahap implementasi, monitoring, dan evaluasi. Salah satu bentuk konkret kebijakan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menjadi landasan kebijakan nasional dalam percepatan penurunan stunting melalui pendekatan terintegrasi, lintas sektor, dan lintas level pemerintahan, serta menegaskan bahwa penanganan stunting bukan hanya urusan sektor kesehatan semata. Secara teknis, peraturan ini terdiri atas batang tubuh yang memuat 8 bab dan 31 pasal, lampiran A berisi 20 target antara, serta lampiran B berupa rincian 71 keluaran dari Pilar Strategi Nasional Percepatan Penurunan

Stunting. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan upaya kesehatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Permasalahan stunting juga menjadi perhatian di Kota Palembang. Penelitian Ashilah et al. (2023) mengenai pemetaan stunting berdasarkan kondisi geografis di Kota Palembang menunjukkan bahwa kasus stunting ditemukan pada beberapa wilayah dengan karakteristik geografis tertentu. Berdasarkan hasil pemetaan yang dibahas dalam bagian pembahasan, wilayah dengan prevalensi stunting sebesar 1–1,4 persen terdapat di Kecamatan Seberang Ulu I sebesar 1,4 persen dan Kecamatan Bukit Kecil sebesar 1,1 persen, sedangkan prevalensi terendah sebesar 0,2 persen ditemukan di Kecamatan Sukarami. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kasus stunting banyak ditemukan pada wilayah yang berdekatan dengan bantaran sungai dan wilayah kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih dari 8.500 jiwa/km². Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Kota Palembang memiliki karakteristik wilayah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan upaya penanggulangannya.

Dengan demikian, kebijakan kesehatan dalam penanggulangan stunting tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan atau program, tetapi juga dengan bagaimana kebijakan tersebut memberikan arah bagi pelaksanaan intervensi, mengatur keterlibatan berbagai pihak, serta menyesuaikan program dengan kondisi daerah. Kondisi stunting di Kota Palembang yang memiliki karakteristik persebaran wilayah tertentu menunjukkan pentingnya kebijakan yang mampu mengarahkan penanganan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai definisi, manfaat, dan tujuan kebijakan kesehatan dalam konteks penanggulangan stunting menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan dapat digunakan sebagai instrumen dalam mendukung upaya penurunan stunting di Kota Palembang.

LANDASAN TEORI

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan kesepakatan terkait suatu isu, saat tujuan dan sasarannya difokuskan pada prioritas tertentu, dan memiliki pedoman untuk mencapainya (S. Nasution et al., 2024). Kebijakan dapat diartikan sebagai kesepakatan akan pemecahan suatu masalah dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan utama. Sedangkan kebijakan publik menurut Thomas R. Dye adalah *what government chose to do and not to do*, artinya kebijakan publik dimaknai sebagai upaya untuk mendefinisikan dan menata dasar yang rasional untuk memilih melakukan atau tidak melakukan suatu keputusan maupun tindakan untuk mencapai tujuan-

tujuan politik tertentu (Pratama et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, William N. Dunn menyebutkan definisi kebijakan publik adalah kumpulan keputusan yang diambil pemerintah, termasuk keputusan untuk tidak bertindak, dalam upaya menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Menurut definisi ini, kebijakan adalah alat yang digunakan pemerintah untuk menangani masalah sosial yang berkembang (Gani & Salsabila, 2026). Lebih lanjut, definisi kebijakan publik menurut James Anderson yaitu *a relatively stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*, artinya kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang konsisten dan berorientasi pada tujuan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dalam menangani suatu masalah atau persoalan yang menjadi perhatian publik (Gani & Salsabila, 2026).

Kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik. Purnama et al. (2022) menyebutkan bahwa kebijakan kesehatan adalah kumpulan gagasan, prinsip, dasar, dan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok pelaku politik untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai keseimbangan fisik, mental, sosial, dan spiritual yang tidak menunjukkan keluhan atau tanda-tanda penyakit atau kelainan. Mengingat kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, penting untuk memahami bagaimana sebuah kebijakan kesehatan itu terbentuk dan dijalankan melalui suatu rangkaian tahapan yang sistematis. Rangkaian tahapan inilah yang dikenal sebagai siklus atau proses kebijakan, yang menjadi kerangka dasar untuk mengkaji bagaimana suatu isu kesehatan, termasuk permasalahan stunting, diangkat menjadi agenda, dirumuskan menjadi kebijakan, diimplementasikan, dipantau, hingga akhirnya dievaluasi keberhasilannya. Berikut uraian siklus/proses suatu kebijakan:

1. Perumusan Masalah: Tahap ini menjadi titik awal proses kebijakan kesehatan, yaitu ketika suatu kondisi di masyarakat mulai dipandang sebagai persoalan yang membutuhkan campur tangan pemerintah. Suatu isu baru diangkat menjadi agenda kebijakan apabila dampaknya dinilai cukup luas dan mendesak untuk ditangani (Purnama et al., 2022).
2. Formulasi Kebijakan: Setelah masalah diidentifikasi, pengambil kebijakan menyusun alternatif solusi yang dituangkan ke dalam bentuk kebijakan, mencakup penentuan tujuan, sasaran, dan instrumen yang akan digunakan untuk menjawab persoalan tersebut (Purnama et al., 2022).

3. Implementasi Kebijakan: Kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan berarti apa-apa tanpa pelaksanaan di lapangan. Implementasi merupakan tahap penerjemahan kebijakan ke dalam tindakan nyata, dan keberhasilannya sangat bergantung pada koordinasi antar-pemangku kepentingan serta kesamaan persepsi terhadap dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan (Purnama et al., 2022). Tahap ini menjadi krusial karena kebijakan sebaik apa pun akan kehilangan makna jika pihak-pihak yang terlibat tidak bergerak dalam arah yang sama.
4. Monitoring Kebijakan: Selama kebijakan berjalan, diperlukan mekanisme pemantauan agar pelaksanaannya tetap sesuai rencana. Monitoring berfungsi sebagai alat kontrol yang memungkinkan pembuat kebijakan mendeteksi lebih awal apabila terjadi penyimpangan atau hambatan di lapangan, sehingga perbaikan dapat segera dilakukan sebelum masalah semakin membesar (Purnama et al., 2022).
5. Evaluasi Kebijakan: Tahap terakhir ini menilai sejauh mana kebijakan berhasil mencapai tujuan awalnya, sekaligus menjadi dasar pertimbangan apakah kebijakan perlu dilanjutkan, direvisi, atau dihentikan (Purnama et al., 2022). Evaluasi juga tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kelembagaan kebijakan itu sendiri.

Konsep Kebijakan Kesehatan

Menurut World Health Organization (2021) dalam Saimi (2025) kebijakan kesehatan adalah kumpulan aturan, konsensus, dan strategi yang digunakan untuk mengontrol, mengarahkan, dan mengoptimalkan sistem kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan dalam kerangka global health governance adalah bagian dari sistem manajemen kesehatan global, yang terdiri dari berbagai undang-undang, aturan, dan institusi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesehatan global. Kemudian Marmote et al (2020) dalam Saimi (2025) menyebutkan kebijakan kesehatan dianggap sebagai cara untuk mencapai kesetaraan kesehatan. Sedangkan menurut (Wong & van den Heuvel, 2022) dalam Saimi (2025) kebijakan kesehatan dapat diartikan sebagai perangkat dinamis yang terus diperbarui berdasarkan evaluasi dan pembelajaran dari krisis kesehatan sebelumnya, sekaligus mempersiapkan masyarakat menghadapi ancaman baru di masa depan.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan kesehatan merupakan seperangkat aturan, konsensus, dan strategi yang bersifat dinamis, digunakan oleh pemerintah maupun institusi terkait untuk mengarahkan dan mengoptimalkan sistem kesehatan dalam rangka mewujudkan kesetaraan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan peningkatan

derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Di Indonesia, kebijakan kesehatan nasional berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam menentukan arah, tujuan, prinsip, serta dasar penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, termasuk pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia (I. Nasution et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kebijakan kesehatan pada dasarnya melekat pada setiap definisi yang dikemukakan para ahli. Selain memiliki tujuan tersebut, kebijakan kesehatan juga memberikan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat. Marmot, Allen, dan Goldblatt (2020) dalam Saimi (2025) menyebutkan bahwa kebijakan kesehatan bermanfaat dalam mengurangi ketidaksetaraan kesehatan serta memperbaiki determinan sosial yang memengaruhi status kesehatan masyarakat. Wong dan van den Heuvel (2022) dalam Saimi (2025) menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan juga berfungsi sebagai perangkat pencegahan penyebaran penyakit melalui kombinasi regulasi, intervensi masyarakat, dan strategi komunikasi risiko. Dengan demikian, manfaat kebijakan kesehatan secara umum dirasakan melalui peningkatan akses layanan, pengurangan kesenjangan kesehatan, dan penguatan ketahanan sistem kesehatan secara berkelanjutan (Saimi, 2025).

Konsep Stunting

Stunting menurut definisi yang digunakan Kementerian Kesehatan merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sebagaimana juga ditegaskan Widyawati et al. (2024). Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor langsung, seperti asupan gizi dan pemberian ASI eksklusif, serta faktor tidak langsung seperti sosial-ekonomi, sanitasi, dan tingkat pendidikan orang tua; Pertiwi & Hendrati (2023) dalam kajiannya di Jawa Timur menemukan bahwa kombinasi faktor-faktor tersebut secara konsisten berkontribusi terhadap tingginya kejadian stunting pada balita. Apabila tidak ditangani, stunting berdampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Untuk mengatasinya, pemerintah Indonesia menyusun strategi penanggulangan melalui delapan aksi konvergensi yang mengintegrasikan intervensi gizi spesifik dan sensitif di tingkat kabupaten/kota hingga desa. Yuliana et al. (2022) dalam penelitiannya di wilayah Sumatera Selatan membuktikan bahwa pelaksanaan kedelapan aksi konvergensi tersebut secara signifikan berhubungan dengan penurunan kejadian stunting, sehingga kerangka ini menjadi acuan penting dalam menganalisis kebijakan penanggulangan stunting di Kota Palembang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (literature review) menggunakan data sekunder. Data diperoleh dari Peraturan Presiden, kebijakan pemerintah, buku, serta artikel dan penelitian terdahulu yang relevan dengan kebijakan kesehatan dan penanggulangan stunting, khususnya di Kota Palembang. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan pemilihan literatur yang sesuai, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan informasi. Analisis difokuskan pada definisi, manfaat, dan tujuan kebijakan kesehatan dalam mendukung penanggulangan stunting di Kota Palembang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan kesehatan merupakan salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan berbagai upaya dalam memecahkan permasalahan kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pelayanan kesehatan, tetapi juga mencakup berbagai keputusan dan tindakan yang memengaruhi penyelenggaraan kesehatan. Menurut Walt dalam (Purwaningsih et al., 2022), kebijakan kesehatan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan dapat dipahami sebagai pedoman yang digunakan untuk menentukan arah dan pelaksanaan upaya kesehatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Salah satu permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan kebijakan kesehatan adalah stunting. Widyawati et al. (2024) menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun akibat kekurangan asupan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Permasalahan stunting membutuhkan perhatian karena penanganannya tidak hanya berkaitan dengan kondisi anak, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Penelitian oleh Andarini et al. (2025) mengenai evaluasi kebijakan penurunan kasus stunting menjelaskan bahwa tingginya kasus stunting membutuhkan upaya penanganan yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah melalui kebijakan untuk menurunkan prevalensi stunting. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan diperlukan sebagai dasar untuk mengarahkan berbagai upaya penanggulangan stunting.

Permasalahan stunting juga masih ditemukan di Kota Palembang. Rosyada et al. (2025) melakukan penelitian terhadap 130 balita usia 24–59 bulan di empat kecamatan di Kota Palembang, yaitu Sako, Ilir Barat 1, Bukit Kecil, dan Alang-Alang Lebar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hanya 14,6% keluarga yang termasuk dalam kategori keluarga pencegahan stunting. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa faktor keluarga, seperti faktor anak, ayah, ibu, sanitasi, pola makan, dan penyakit infeksi, berkaitan dengan pembentukan keluarga pencegahan stunting. Pendidikan ayah ditemukan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi pembentukan keluarga pencegahan stunting. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan stunting di tingkat masyarakat juga membutuhkan keterlibatan keluarga.

Manfaat Kebijakan Kesehatan dalam Penanggulangan Stunting

Kebijakan kesehatan memiliki peran penting dalam mengarahkan upaya peningkatan kesehatan masyarakat agar terlaksana secara terencana dan sesuai kebutuhan. Kebijakan tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi perlu diimplementasikan, dipantau, dan dievaluasi agar tujuan kesehatan yang ditetapkan dapat tercapai. Keberhasilan kebijakan kesehatan sangat dipengaruhi oleh proses implementasi, evaluasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai arahan di atas kertas, tetapi juga bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata.

Dalam penanggulangan stunting, manfaat kebijakan kesehatan menjadi semakin penting karena stunting merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan penanganan terpadu. Penurunan stunting tidak hanya berkaitan dengan intervensi gizi dan pelayanan kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan sektor lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Supriyanto & Jannah (2023) menunjukkan bahwa kebijakan percepatan penurunan stunting di Indonesia menekankan adanya konvergensi lintas sektor. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan berperan dalam mendorong koordinasi berbagai sektor agar penanggulangan stunting tidak dilakukan secara terpisah, melainkan melalui intervensi yang saling mendukung.

Di Kota Palembang, manfaat kebijakan kesehatan dapat dilihat dari adanya kebijakan daerah yang menjadi dasar pelaksanaan berbagai intervensi penanggulangan stunting. Erlyn et al. (2021) menemukan bahwa pemerintah Kota Palembang melaksanakan intervensi gizi spesifik, seperti inisiasi menyusui dini, pemberian ASI eksklusif, dan pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil, serta intervensi gizi sensitif melalui sektor nonkesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penanggulangan kemiskinan. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga menemukan bahwa koordinasi dan sinergi antarinstansi masih belum optimal, sehingga implementasi kebijakan perlu terus diperkuat.

Kebijakan kesehatan juga membantu pemerintah menentukan sasaran intervensi secara lebih tepat. Penelitian Ashilah et al. (2023) mengenai pemetaan stunting di Kota Palembang menunjukkan adanya variasi kejadian stunting berdasarkan kondisi geografis wilayah. Informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas wilayah dan kelompok sasaran dalam pelaksanaan intervensi. Dengan demikian, manfaat kebijakan kesehatan dalam penanggulangan stunting di Kota Palembang dapat dilihat dari kemampuannya memberikan arah program, mendorong koordinasi lintas sektor, serta mendukung penentuan intervensi berdasarkan kondisi dan kebutuhan wilayah.

Manfaat kebijakan kesehatan juga dapat dilihat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. Amalia et al. (2025) membahas kegiatan pemberdayaan ibu dalam pemberian bekal gizi seimbang untuk mencegah stunting di Rusun 23 Ilir Kota Palembang. Kegiatan tersebut dilakukan melalui edukasi dan pendampingan kepada ibu mengenai pemberian gizi seimbang. Kegiatan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan stunting dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterlibatan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak.

Selain pemberdayaan masyarakat, upaya penanganan stunting juga dilakukan melalui intervensi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Rahayu et al. (2025) mengevaluasi program pemberian makanan tambahan berupa satu telur setiap hari bagi balita stunting di Puskesmas Multiwahana Kota Palembang. Penelitian tersebut menemukan bahwa program satu telur setiap hari telah dilaksanakan secara efektif dalam memberikan telur kepada balita stunting. Program tersebut menunjukkan adanya penerapan upaya penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan gizi secara langsung kepada kelompok sasaran.

Tujuan Kebijakan Kesehatan dalam Penanggulangan Stunting

Kebijakan kesehatan merupakan bagian dari kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam buku “Kebijakan Kesehatan Nasional” menjelaskan bahwa kebijakan kesehatan merupakan serangkaian langkah strategis pemerintah atau lembaga terkait untuk mempromosikan, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kesehatan diarahkan pada pelayanan yang mudah diakses, berkualitas, dan adil. Prinsip Sistem Kesehatan Nasional yang menekankan aksesibilitas, kualitas pelayanan, keadilan sosial, pencegahan, promosi kesehatan, serta koordinasi antarkomponen menjadi dasar penting dalam penanggulangan stunting (Betan et al., 2023)

Kebijakan penanggulangan stunting bertujuan menurunkan prevalensi stunting sekaligus meningkatkan status gizi masyarakat. Stunting menjadi prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2020–2024 dengan target prevalensi 14% pada tahun 2024. Dalam penelitian (Khasanah et al., 2023) menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik berfokus pada pemenuhan gizi, terutama selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sedangkan intervensi sensitif mencakup akses pangan bergizi, pengasuhan, pelayanan kesehatan dan gizi, air bersih, serta sanitasi.

Kemudian, penelitian yang dilakukan (Anurogo et al., 2024) menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang efektif berkaitan dengan penurunan angka stunting melalui strategi terpadu, seperti peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak, dukungan gizi, edukasi pemberian makanan, serta akses air bersih dan sanitasi. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan et al., 2024) menjelaskan bahwa penanggulangan stunting dilakukan melalui pemenuhan gizi ibu hamil dan balita, pemberian tablet tambah darah dan makanan tambahan, pemantauan pertumbuhan, imunisasi dasar, serta edukasi gizi dan pola asuh. Dengan demikian, tujuan kebijakan kesehatan dalam penanggulangan stunting mencakup pencegahan sejak dini, pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

Stunting juga masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian di Kota Palembang karena berkaitan dengan pertumbuhan anak dan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dalam penelitian (Selanli et al., 2024) disebutkan bahwa kasus stunting di Kota Palembang masih perlu ditangani karena apabila tidak segera ditindaklanjuti dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Meskipun prevalensi stunting di Kota Palembang berdasarkan data E-PPGBM menunjukkan kecenderungan menurun, yaitu dari 7,5% pada 2019 menjadi 1,7% pada 2020, 1,1% pada 2021, dan 0,44% pada 2022, keberadaan kasus stunting tetap menjadi perhatian pemerintah daerah.

Kondisi tersebut juga terlihat dari adanya perbedaan jumlah kasus stunting antar wilayah di Kota Palembang. Penelitian (Mayla et al., 2025) menunjukkan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang tahun 2023, Kecamatan Kertapati memiliki 52 kasus stunting, Kecamatan Seberang Ulu 1 sebanyak 41 kasus, dan Kecamatan Ilir Timur II sebanyak 31 kasus. Perbedaan jumlah kasus tersebut menunjukkan adanya disparitas antar kecamatan sehingga intervensi kebijakan kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-

masing wilayah. Secara khusus, penelitian di Kecamatan Seberang Ulu 1 menunjukkan bahwa prevalensi atau jumlah kasus yang masih ditemukan menjadi dasar perlunya intervensi gizi melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Dalam konteks kebijakan kesehatan, tujuan utama pemerintah Kota Palembang adalah mempercepat pencegahan, pengendalian, dan penurunan stunting melalui intervensi yang terintegrasi. (Selanli et al., 2024) menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palembang menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan, Pengendalian dan Penurunan Stunting Terintegrasi. Kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting berdasarkan Keputusan Wali Kota Palembang Nomor 48/KPTS/DPPKB/2022. Tujuannya adalah agar penanganan stunting dilakukan secara terkoordinasi melalui intervensi spesifik, intervensi sensitif, perubahan perilaku, pendampingan keluarga, serta koordinasi, perencanaan, dan monitoring-evaluasi.

Tujuan tersebut kemudian diwujudkan melalui berbagai program yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi anak. Di Kecamatan Sukarami, misalnya, pemerintah menjalankan program *"OReO PACK (One Resto One Pack) for Stunted Children"* dengan melibatkan rumah makan dan masyarakat sebagai donatur makanan bagi anak stunting dan ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK). Program ini secara khusus diarahkan untuk mengurangi angka stunting dan bahkan menargetkan kondisi *"zero stunting"* di wilayah tersebut. Sementara itu, di Kecamatan Seberang Ulu 1, kebijakan PMT ditujukan untuk memperbaiki status gizi anak-anak berisiko stunting sekaligus meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya pemenuhan nutrisi anak. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.

Selain peningkatan asupan gizi, kebijakan penanggulangan stunting di Palembang juga bertujuan memastikan program berjalan secara berkelanjutan melalui pemantauan dan kerja sama lintas sektor. Penelitian (Rahayu et al., 2025) mengenai Program Satu Hari Satu Telur di Puskesmas Multiwahana menunjukkan bahwa program telah mencapai sasaran distribusi telur kepada balita stunting, tetapi masih menghadapi kendala dalam pengawasan konsumsi dan distribusi. Oleh karena itu, tujuan kebijakan tidak hanya sebatas memberikan makanan tambahan, tetapi juga memperbaiki status gizi, mencegah peningkatan kasus, dan memastikan intervensi dapat memberikan dampak yang optimal. Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa keberhasilan program membutuhkan kolaborasi antara Dinas Kesehatan, puskesmas, kader posyandu, PKK, pemerintah daerah, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa kebijakan kesehatan merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menentukan langkah untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat. Dalam penanggulangan stunting, kebijakan tidak hanya berfokus pada pemberian pelayanan kesehatan. Kebijakan juga mengatur pelaksanaan intervensi gizi serta mendorong keterlibatan berbagai sektor dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep kebijakan publik yang menjelaskan bahwa kebijakan digunakan pemerintah untuk memberikan solusi terhadap masalah yang menjadi perhatian masyarakat.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan memberikan manfaat dalam mengarahkan program penanggulangan stunting agar lebih terencana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di Kota Palembang manfaat tersebut terlihat melalui pemberian makanan tambahan, pemenuhan gizi, edukasi keluarga, pendampingan serta pemberdayaan masyarakat. Kebijakan juga membantu pemerintah menentukan wilayah dan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan kondisi masing-masing daerah. Pelaksanaan program seperti pemberian satu telur setiap hari dan kegiatan pemberdayaan keluarga menunjukkan bahwa kebijakan telah diterapkan dalam bentuk kegiatan yang menyentuh kelompok sasaran secara langsung.

Tujuan kebijakan kesehatan dalam penanggulangan stunting adalah mencegah terjadinya stunting sejak dini serta memperbaiki kondisi gizi anak. Kebijakan juga diarahkan untuk menurunkan jumlah kasus dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Di Kota Palembang tujuan tersebut didukung melalui Peraturan Wali Kota Nomor 41 Tahun 2020 dan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting. Namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam koordinasi dan pengawasan. Perbedaan kondisi antarwilayah juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan intervensi. Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang lebih baik dan pemantauan secara berkelanjutan agar kebijakan penanggulangan stunting di Kota Palembang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Andarini, D., Idris, H., Anggraini, R., & Permatasari, R. (2025). Kajian Pustaka : Evaluasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting Literature Review: Evaluation of Stunting Case Reduction Policies. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 14(2), 63–69.
- Anurogo, D., Habibi, Ximenis, V. D., & Wahidin. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan Kesehatan dan Partisipasi Masyarakat dalam Mengurangi Angka Stunting di Jakarta.

- Jurnal Multidisiplin West Science, 3(07), 1034–1043.
<https://doi.org/10.58812/jmws.v3i07.1487>
- Amalia, R. N., Najmah, Fajar, N. A., Apriliani, F., Hervilanti, P., LG, R. C. C., Dianaulina, D., Yuliantari, D., Saputra, J. A., & LG, R. E. G. (2025). Rusun Berdaya dan Beraksi: Pemberdayaan Ibu dalam Pemberian Bekal Gizi Seimbang dalam Pencegahan Stunting di Rusun 23 Ilir Kota Palembang. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 9(3), 614–625. <https://doi.org/10.20956/pa.v9i3.40284>
- Andarini, D., Idris, H., Anggraini, R., & Permatasari, R. (2025). Kajian Pustaka : Evaluasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting Literature Review: Evaluation of Stunting Case Reduction Policies. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 14(2), 63–69.
- Ashilah, A., Najmah, Fahrizal, F., Trisnawarman, & Rahayu, S. (2023). Pemetaan Stunting, Wasting, dan Obesitas Berdasarkan Kondisi Geografis di Kota Palembang. *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Indonesia*, 7(2). <https://doi.org/10.7454/epidkes.v7i2.1084>
- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2023). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 dalam angka. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/ski-2023-dalam-angka/>
- Betan, A., Sofiantin, N., Sanaky, M. J., N.L, N. S., Primadewi, B. K., Arda, D., Kamaruddin, M. I., A.AM, A. M., & Indriyani. (2023). Kebijakan Kesehatan nasional.
- Erlyn, P., Hidayat, B. A., Fatoni, A., & Saksono, H. (2021). Nutritional Interventions by Local Governments as an Effort to Accelerate Stunting Reduction. *Jurnal Bina Praja*, 13(3), 543–553. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.543-553>
- Fatikha, N. T., & Permatasari, A. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN STUNTING. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277–287.
- Gani, A., & Salsabila, S. (2026). Kebijakan Publik Dalam Perspektif Teoritis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i3.6472>
- Hasibuan, I. S. M., Hasibuan, A. N. R., Putri, S. A., & Purba, S. H. (2024). Literature Review Implementasi Kebijakan Kesehatan Penurunan Stunting di Kota Medan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2280–2285. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5403>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Perpres percepatan penurunan stunting untuk perbaikan gizi Indonesia. <https://www.bappenas.go.id/berita/perpres-percepatan-penurunan-stunting-untuk-perbaikan-gizi-indonesia-2oPyg>
- Khasanah, E. N., Purbaningrum, D. G., Andita, C., & Setiani, D. A. (2023). Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 217–231.

<https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i2.482>

- Nasution, I., Nainggolan, A., Azzifa, M., Nasution, A., Khalila, N., Lubis, N., Afsari, N., & Madina, T. (2025). KONSEP TEORI KEBIJAKAN KESEHATAN. *Journal Iof Innovative Iand ICreativity*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.1641>
- Nasution, S., Said, N., Salsabila, M., Maulidia, A., Aulia, Z., & Ramadhani, S. (2024). Kebijakan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan, Tantangan, dan Rekomendasi. *Vitamin : Jurnal Ilmu Kesehatan Umum*, 2(3), 195–206. <https://doi.org/10.61132/vitamin.v2i3.509>
- Mayla, J. D., Isabella, & Putra, D. A. (2025). Implementasi Program Pemberian Makanan. *Govarnance*, 13(1), 17–31.
- Pertiwi, A., & Hendrati, L. (2023). Literature Review: Analysis of the Causes of Stunting in Toddlers in East Java Province. *Amerta Nutrition*, 7(2), 320–327. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/amnt.v7i2SP.2023.320-327>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/168225/Perpres%20Nomor%2072%20Tahun%202021.pdf>
- Pratama, D., Putera, R., & Koeswara, H. (2022). ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA. *JAP: Jurnal Administrasi Publik*, 13(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v13i2>
- Purnama, N., Manesanulu, R., & Sibarani, E. (2022). HEALTH POLICY FORMULATION PROCESS: PROBLEM FORMULATION, FORMULATION, IMPLEMENTATION, MONITORING, AND EVALUATION: LITERATURE REVIEW. *JARSI: Jurnal Administrasi RS Indonesia*, 1(1). <https://jurnal.stikesbaptis.ac.id/index.php/jarsi/issue/view/41>
- Purwaningsih, S., Dafer, F., Haslinah, Fajrah, S., Rikwan, Usman, Sari, R. W., Majid, M., Nasir, A., & Salim, A. (2022). *KEBIJAKAN KESEHATAN* (1st ed.). Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Rahayu, R. S., Ainy, A., Budi, I. S., & Lubis, A. I. (2025). Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan Menggunakan Satu Hari Satu Telur Pada Balita Stunting di Puskesmas Multiwahana Kota Palembang. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 10(1), 84. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v10i1.23401>
- Rosyada, A., Putri, D. A., Anggraini, R., Rahmawati, A. Z., & Amalina, A. (2025). Pengembangan Model Keluarga Pencegahan Stunting di Kota Palembang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 14(2), 133–140. <https://doi.org/10.33221/jikm.v14i02.3765>
- Salsabila, G., Najmah, Aprina, F., Arpansyah, Cahyoni, H., & Nurita, Y. (2024). Analisis Spasial

- Indikator Faktor Risiko Balita Stunting di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 23.
<https://doi.org/10.33221/jikes.v23i1.2958>
- Selanli, M., Putra, D. A., & Nofrima, S. (2024). Implementasi Program “Oreo Pack” Dalam Mengurangi Stunting (Studi Kasus: Kecamatan Sukarami Kota Palembang). *TheJournalish: Social and Government*, 5(3), 239–249.
- Saimi. (2025). TRANSFORMASI KEBIJAKAN KESEHATAN (F. Nafira, Ed.; 1st ed.). Penerbit Arta Media Nusantara.
- Supriyanto, A., & Jannah, L. M. (2022). Analisis Integrasi Kebijakan Upaya Konvergensi Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lebak. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 11(2), 349–363.
<https://doi.org/10.33007/ska.v11i2.3080>
- Widyawati, M. N., Sumarni, S., Wijayanti, K., Sutomo, B., Widarwati, S. E., Wiboso, M. A., & Aquarista, N. (2024). Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI*, 13(03), 159–169.
- Yuliana, Y., Nuru, H., & Sianipar, B. K. (2022). Kejadian Stunting Berhubungan dengan 8 Aksi Konvergensi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 6(1), 284–289.
<https://doi.org/10.31539/jks.v6i1.4221>